



## **PEMETAAN KERAWANAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2018**

Badan Pengawas Pemilihan Umum

### **PENGANTAR**

Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018. Setiap potensi pelanggaran yang muncul akan berpengaruh langsung terhadap prosedur pemungutan dan hasil pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaan kerawanan menjadi cara bagi pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS.

Kerawanan di TPS adalah “Setiap peristiwa yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pilihan”. Pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk a) identifikasi strategi pengawasan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran di hari pemungutan dan penghitungan suara, b) penyediaan analisis berbasis kerawanan TPS dan sekitarnya untuk menyusun langkah pencegahan dan c) identifikasi tingkat kesiapan penyelenggara Pemilu dalam mempersiapkan dan melayani hak pilih.

Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, konsep operasionalisasi kerawanan TPS dirumuskan dalam enam (6) variabel dan lima belas (15) indikator yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap tingkat kerawanan di TPS menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara.

Variabel	Indikator
Akurasi Data Pemilih	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.</li><li>2. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.</li></ol>

Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemilih disabilitas</li> <li>4. Terdapat jumlah pemilih DPTb diatas 20 pemilih didalam satu TPS</li> <li>5. Terdapat TPS di wilayah khusus; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekitar rumah sakit</li> <li>b. daerah eksodus</li> <li>c. pegunungan</li> <li>d. lautan/pesisir/sungai</li> <li>e. bencana</li> <li>f. hutan</li> <li>g. perbatasan</li> <li>h. daerah yang tidak terjangkau</li> <li>i. hunian vertikal (rusun, apartemen)</li> <li>j. konflik wilayah administrasi</li> </ul> </li> </ul>
Politik uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di wilayah TPS.</li> <li>7. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye</li> <li>8. Terdapat relawan bayaran pasangan calon diwilayah TPS</li> </ul>
Netralitas KPPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu.</li> </ul>
Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS</li> <li>11. TPS berada di dekat posko/rumah tim sukses pasangan calon</li> <li>12. Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis</li> <li>13. Ketersediaan logistik</li> </ul>
Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras dan golongan disekitar TPS.</li> <li>15. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.</li> </ul>

Pengumpulan data dan informasi terhadap kerawanan di TPS dilakukan oleh Pengawasan TPS sepanjang 10 – 22 Juni 2018. Pengambilan data ini untuk mendapatkan informasi kesiapan pelaksanaan tahapan pemilihan menuju hari pemungutan suara dan kondisi mutakhir dari tahapan menuju pemungutan dan penghitungan di TPS dan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, terdapat 171 daerah yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 Propinsi, Bupati dan Wakil Bupati di 115 Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. Jumlah TPS seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 387.599 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan)

dengan jumlah pemilih sebanyak 152.066.686 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratur Delapan Puluh Enam).

NO	PROVINSI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		TOTAL PEMILIH
			L	P	
1	ACEH	831	149.715	158.011	307.726
2	SUMUT	27.478	4.483.983	4.566.639	9.050.622
3	SUMBAR	1.982	330.443	344.607	67.505
4	RIAU	12.048	1.840.291	1.782.196	3.622.487
5	JAMBI	2.520	415.471	420.212	835.683
6	SUMSEL	16.903	2.854.223	2.802.410	5.656.633
7	BENGGULU	622	113.867	116.302	230.169
8	LAMPUNG	15.006	2951.659	2816.402	5.768.061
9	BANGKA BELITUNG	1.317	226.552	220.883	447.435
10	KEPULAUAN RIAU	317	69.828	71.949	141.777
11	JABAR	74.954	15.945.493	15.784.546	31.730.039
12	JATENG	63.973	13.479.002	13.589.493	27.068.495
13	JATIM	67.644	14.840.347	15.315.372	30.155.719
14	BANTEN	10.467	2.132.420	2.086.704	4.219.124
15	BALI	6.296	1.487.822	1.494.379	2.982.201
16	NTB	8.336	1.729.898	1.781.992	3.511.890
17	NTT	9.672	1.561.723	1.624.555	3.186.278
18	KALBAR	11.658	1.761.507	1.687.146	3.448.653
19	KALTENG	3.921	588.439	555.911	1.144.350
20	KALSEL	2.257	340.931	340.876	681.807
21	KALTIM	7.287	1.209.660	1.120.496	2.330.156
22	KALTARA	300	68.505	64.840	133.345
23	SULUT	1.528	299.161	291.879	591.040
24	SULTENG	1.716	300.322	285.410	585.732
25	SULSEL	17.140	2.922.241	3.100.746	6.022.987
26	SULTRA	4.910	812.996	815.324	1.628.320
27	GORONTALO	515	103.079	106.594	209.673
28	SULBAR	1.283	201.616	204.480	406.096
29	MALUKU	3.358	566.271	583.719	1.149.990
30	MALUKU UTARA	2.138	377.755	369.964	747.719
31	PAPUA	9.222	1.815.275	1.582.154	3.397.429

## VARIABEL KERAWANAN

Terdapat enam (6) variabel dalam kerawanan TPS yaitu Akurasi data pemilih (2 indikator), Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih (3 indikator), politik uang (3 indikator), Netralitas KPPS (1 Indikator), Pemungutan suara (4 indikator) dan Kampanye (2 indikator).

Variabel Akurasi data pemilih paling rawan potensial terjadi di 91.979 TPS (24 persen), Penggunaan Hak pilih/Hilangnya Hak Pilih terjadi di 80.073 TPS (21 persen), Pemungutan Suara terjadi di 40.574 TPS (10 persen), Politik Uang terjadi di 26.789 TPS (7 persen), Kampanye terjadi di 10735 TPS (3 persen) dan Netralitas KPPS terjadi di 5.810 TPS (1 persen).

Akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih menjadi kerawanan paling tinggi disebabkan oleh faktor perekaman KTP Elektronik yang belum selesai, pemenuhan elemen informasi dalam data pemilih yang kurang lengkap dan keliru, kecilnya jumlah pemilih dan tantangan pelayanan bagi pemilih disabilitas saat pemungutan suara, tidak adanya kepastian ketersediaan dukungan pemungutan suara untuk pemilih di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan serta lokasi TPS yang jangkauannya jauh dari tempat tinggal pemilih.

Politik uang tetap menjadi perhatian penting menjelang pemungutan suara karena terdapat 26.860 di sekitar TPS yang terindikasi terdapat aktor dan kelompok yang berpotensi mempengaruhi pemilih dengan pemberian uang dan/atau barang.

NO	VARIABEL	JUMLAH TPS	KERAWANAN TPS	PROSENTASE
1	Akurasi Data Pemilih	387.586	91.979	24%
2	Penggunaan Hak Pilih Atau Hilangnya Hak Pilih		80.073	21%
3	Pemungutan Suara		40.574	10%
4	Politik Uang		26.789	7%
5	Kampanye		10.735	3%
6	Netralitas KPPS		5.810	1%

## INDIKATOR KERAWANAN

Terdapat 15 indikator dalam mengukur kerawanan di tingkat TPS. Tiga (3) Indikator paling besar yang menyebabkan kerawanan di TPS seluruhnya terkait data pemilih.

Tiga indikator tersebut terjadi dalam pemenuhan hak pilih, keberadaan pemilih disabilitas dan kualitas data pemilih Pilkada. Indikator "Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT" terjadi di 55.510 TPS (14 persen). Indikator "Keberadaan pemilih disabilitas" terjadi di 53.328 TPS

(14 persen) dan Indikator terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar terjadi di 36.469 TPS (9 persen).

Pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar di DPT disebabkan oleh faktor syarat memilih memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan untuk terdaftar dalam DPT. Sementara keberadaan pemilih disabilitas disebabkan oleh kurang maksimalnya petugas PPDP dalam memberikan informasi jenis disabilitas dalam DPT sehingga menjadi kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar di DPT disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP tidak dilakukan di setiap rumah.

Sementara 12 Indikator lainnya adalah terdapat pemilih yang di daerah dengan daya jangkau yang jauh dengan TPS terjadi di 17.312 TPS (4 persen), ketersediaan dan kendala distribusi logistik Pemilihan terjadi di 17.72 (5 persen), adanya aktor yang berpotensi melakukan politik uang terjadi di 10.169 sekitar TPS (3 persen), Surat Pemberitahuan memilih (C6) yang tidak terdistribusi secara langsung terjadi di 9989 TPS (3 persen), adanya pemilih DPTb yang lebih dari 20 pemilih dalam satu TP Sterjadi di 9367 TPS (2 persen), adanya praktik mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih berdasarkan Agama, Suku, Ras dan Antar Golongan terjadi di 7947 TPS (2 persen), adanya relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS terjadi di 8621 TPS (2 persen).

Berikutnya adalah adanya indikasi mempengaruhi pemilih dengan pemberian uang atau barang pada masa kampanye terjadi di 7999 TPS (2 persen), adanya TPS yang berada di dekat posko/rumah tim sukses pasangan calon terjadi di 7229 TPS (2 persen), adanya petugas KPPS yang mendukung pasangan calon tertentu terdapat di 5810 TPS (1 persen), adanya Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis terdapat di 5635 TPS (1 persen) dan adanya praktik menghina/menghasut diantara pemilih dengan menggunakan SARA di sekitar TPS terjadi di 278 TPS (1 persen).

No	INDIKATOR KERAWANAN	JUMLAH TPS KESELURUHAN	JUMLAH KERAWANAN TP	%
1	Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	387599	55510	14%
2	Terdapat Pemilih Disabilitas		53328	14%
3	Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT		36469	9%
4	Terdapat pemilih di wilayah khusus ( daerah eksodus, pegunungan, lautan, sunagi, bencana, hutan, perbatasan, daerah tidak terjangkau, hunian vertikal, konflik daerah		17312	4%
5	Ketersediaan dan Distribusi Logistik		17721	5%
6	Terdapat aktor politik uang ( bohir, cukong, broker, dll) di wilayah TPS		10169	3%
7	C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS		9989	3%
8	Terdapat jumlah pemilih DPTb diatas 20 pemilih didalam satu TPS		9367	2%
9	Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan disekitar TPS		7947	2%
10	Terdapat relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS		8621	2%
11	Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye		7999	2%
12	TPS berada didekat posko/rumah tim sukses pasangan calon		7229	2%
13	Terdapat Petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu		5810	1%
14	Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis		5635	1%
15	Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS		2788	1%

## ANALISIS DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pemetaan kerawanan TPS, diketahui data pemilih dan pemenuhan hak pilih saat pemungutan dan penghitungan suara menjadi tantangan paling besar dalam menjami proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat dalam memberikan suaranya pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 maka;

1. KPU menjamin pemenuhan hak pilih terhadap pemilih yang mengalami kendala karena tidak terdaftar padahal memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dan mempermudah pemilih yang terdaftar di DPT dalam melaksanakan hak pilihnya secara benar dan jujur.
2. KPU memaksimalkan distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (C6) kepada pemilih yang berhak menerimanya dan menyampaikan secara langsung hingga satu hari menjelang pemungutan suara untuk semakin menjamin hak pilih dan meningkatkan partisipasi pemilih.

3. KPU menjamin nama-nama yang terdaftar di DPT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tidak disalahgunakan siapapun dengan menandai nama-nama pemilih yang TMS tersebut dan disampaikan ke Pengawas Pemilihan dan Saksi Pasangan Calon.
4. KPU menjamin ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah dan kendala distribusi surat suara di wilayah pemilihan yang terdapat di Rumah Sakit/Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Tahanan, dan Lapas untuk menjamin hak pilih secara optimal.
5. KPU memberikan ruang gerak Pengawas TPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. Pengawas Pemilihan berwenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan dapat berpindah tempat sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan menjamin kerahasiaan suara.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum meningkatkan fokus pengawasan dan perhatian lebih terhadap TPS yang terindikasi rawan dengan melakukan strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan yang dilakukan menjelang pemungutan suara adalah patroli pengawasan, koordinasi dengan pemangku kepentingan di setiap daerah Pilkada dan konsolidasi antara penyelenggara Pilkada. Pengawas Pemilu juga telah menyediakan tata kelola penindakan cepat jika ditemukan dan adanya laporan potensi pelanggaran selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.
7. Badan pengawas pemilihan umum mengajak masyarakat pemilih untuk melaporkan setiap potensi pelanggaran terutama terkait dengan hak pilih, politik uang dan politisasi SARA. Laporan dapat disampaikan kepada Pengawas pemilihan dengan disampaikan langsung atau melalui aplikasi Gowaslu.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**  
**Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350**  
**Telepon: 021 - 3905889 / 3907911**

LAMPIRAN

**REKAP PEMETAAN TPS RAWAN PEMILIHAN 2018**

NO	NAMA PROVINSI	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS	JML TPS
			Rawan Indikator 1	Rawan Indikator 2	Rawan Indikator 3	Rawan Indikator 4	Rawan Indikator 5	Rawan Indikator 6	Rawan Indikator 7	Rawan Indikator 8	Rawan Indikator 9	Rawan Indikator 10	Rawan Indikator 11	Rawan Indikator 12	Rawan Indikator 13	Rawan Indikator 14	Rawan Indikator 15
1	ACEH	831	195	170	85	325	0	57	28	28	0	0	0	170	0	0	0
2	SUMUT	27478	27478	3743	2779	2222	863	1082	1119	847	1056	461	377	356	762	3695	116
3	RIAU	12048	696	332	916	230	581	299	308	203	118	145	223	229	799	126	13
4	KEPRI	317	27	19	81	8	10	2	3	2	21	16	29	16	2	2	1
5	BENGKULU	622	44	45	128	1	36	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
6	SUMBAR	1982	158	108	125	25	28	42	63	6	1	47	32	2	36	0	0
7	SUMSEL	16903	2065	1369	1711	270	872	264	237	138	151	283	276	240	560	32	147
8	LAMPUNG	15006	620	415	435	98	629	167	400	167	12	30	98	37	252	32	81
9	BABEL	1317	74	59	343	26	49	24	59	366	2	17	19	10	23	13	1
10	JAMBI	2520	159	97	428	43	84	69	54	40	22	21	32	22	43	47	53
11	JABAR	74954	1401	1461	4404	151	428	379	325	628	56	305	755	207	2778	103	63
12	JATENG	63973	4396	9529	15566	672	1693	582	385	811	162	1676	853	841	0	204	346
13	JATIM	67644	3344	7975	10169	1024	2552	1622	782	1212	869	2105	1137	897	3677	1078	355
14	KALBAR	11658	1684	412	1398	214	618	813	491	860	321	887	413	274	1208	795	360
15	KALTIM	7287	1019	441	1408	373	508	448	311	436	60	220	346	374	950	173	127
16	KALSEL	2257	148	129	425	11	148	26	80	265	21	157	66	113	100	7	11
17	KALTARA	300	49	27	75	20	48	12	20	27	0	4	29	1	16	4	2
18	SULSEL	17140	2,230	2,077	5,316	874	1,984	784	776	864	324	1,038	619	638	1,643	388	337
19	SULTENG	1716	272	401	289	95	183	56	42	45	16	62	37	66	105	82	26
20	SULTRA	4910	904	512	1090	174	662	498	331	373	234	130	152	185	280	241	114
21	GORONTALO	515	45	67	262	27	151	57	47	46	6	23	67	21	86	20	21
22	BANTEN	10467	619	1462	420	402	339	183	44	64	10	13	178	15	1078	70	17
23	PAPUA	9222	1675	1868	34	768	2234	224	932	59	1877	1137	752	229	1672	277	0
24	SULUT	1528	288	522	259	38	83	326	220	103	41	18	56	28	37	58	17
25	NTB	8336	595	337	870	155	567	477	437	254	118	63	157	211	359	84	122
26	NTT	9672	2615	1073	1014	316	560	264	67	127	85	38	86	123	99	110	232
27	MALUT	2138	152	97	0	92	131	98	82	42	-	106	4	-	131	99	105
28	BALI	6296	306	405	1178	121	344	51	13	17	13	417	157	74	446	13	9
29	SULBAR	1283	342	306	266	130	216	238	30	354	38	138	102	56	10	18	12
30	KALTENG	3921	1,037	424	1,347	274	392	869	260	172	122	356	87	318	157	19	8
31	MALUKU	3358	873	587	507	188	319	156	53	65	54	76	72	52	242	157	92
32	<b>TOTAL</b>	<b>387599</b>	<b>55510</b>	<b>36469</b>	<b>53328</b>	<b>9367</b>	<b>17312</b>	<b>10169</b>	<b>7999</b>	<b>8621</b>	<b>5810</b>	<b>9989</b>	<b>7229</b>	<b>5635</b>	<b>17721</b>	<b>7947</b>	<b>2788</b>
33			14%	9%	14%	2%	4%	3%	2%	2%	1%	3%	2%	1%	5%	2%	1%
34			91979		80007		26789		5810		40574		10735				
			24%		21%		7%		1%		10%						3%

INDIKATOR	
Indikator 1	: terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT
Indikator 2	: terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT
Indikator 3	: Pemilih Disabilitas
Indikator 4	: terdapat jumlah pemilih DPTb diatas 20 pemilih didalam satu TPS
Indikator 5	: terdapat pemilih diwilayah khusus ( daerah eksodus, pegunungan, lautan, sunagi, bencana, hutan, perbatasan, daerah tidak terjangkau, hunian vertikal, konflik daerah
Indikator 6	: terdapat aktor politik uang ( bohir, cukong, broker, dll) diwilayah TPS
Indikator 7	: terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye
Indikator 8	: terdapat relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS
Indikator 9	: petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu
Indikator 10	: C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS
Indikator 11	: TPS berada didekat posko/ rumah tim sukses pasangan calon
Indikator 12	: ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis
Indikator 13	: Ketersediaan Logistik
Indikator 14	: terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan disekitar TPS
Indikator 15	: terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS